

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 9 NOVEMBER 2020 – 10 JANUARI 2021
(Masa Sidang Mulai Tanggal 9 November – 11 Desember 2020
dan Masa Reses Mulai Tanggal 12 Desember 2020 – 10 Januari 2021)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

RUU Usul Inisiatif Prioritas Pemerintah Tahun 2020

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)

1. Terkait dengan RUU PDP, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 pembahasan RUU tentang PDP masih dalam tahap Panitia Kerja (Panja).
2. Panja telah melaksanakan pembahasan terhadap Cluster DIM Perubahan Substansi sejak tanggal 11 November sampai dengan 30 November 2020.
3. Panja telah membahas sebanyak 31 DIM Cluster Perubahan Substansi.
4. Panja akan melanjutkan pembahasan terhadap RUU tentang PDP pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Komisi I DPR RI tidak melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

III. **FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan kegiatan:

1. **Panja Pengawasan Komisi I DPR RI**

a. **Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19**

1) Panja telah menyampaikan Laporan kegiatannya pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 10 November 2020 dan Rapat Intern dapat menerima Laporan tersebut untuk selanjutnya menjadi rekomendasi Komisi I DPR RI kepada Mitra Kerja terkait.

2) Adapun rekomendasi Panja adalah sebagai berikut:

a) **Aspek Keterbatasan Infrastruktur TIK**

- i. Komisi I DPR RI perlu mendesak Pemerintah melalui Kemkominfo yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan percepatan ketersediaan infrastruktur TIK (Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di wilayah 3T, Fasilitas Percepatan Penggelaran Infrastruktur oleh operator telekomunikasi di wilayah non 3T, Digitalisasi Penyiaran, Dukungan Layanan Pos Logistik) untuk percepatan Digitalisasi Nasional, sehingga masyarakat mendapatkan percepatan kemudahan dan kesetaraan akses serta konektivitas jaringan internet yang merata dalam menyambut kehidupan tatanan baru dengan baik.
- ii. Komisi I DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk memiliki pemimpin ICT, agar ada kejelasan keberpihakan pimpinan dalam melakukan pengembangan transformasi teknologi digital.
- iii. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan pertumbuhan data, yaitu dengan membangun platform digital nasional dan mengintegrasikan Satu Data.

b) **Aspek Keterbatasan SDM TIK dan Ekosistem Digital**

- i. Komisi I DPR RI perlu mendesak Pemerintah untuk meningkatkan berbagai Program dan Kegiatan di K/L, dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak antara lain: Perusahaan Jaringan Telekomunikasi, Lembaga Pendidikan, sector Swasta, mempercepat Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) TIK.

- ii. Komisi I DPR RI juga perlu mendesak Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendesain kurikulum Sistem Pendidikan di Indonesia yang menghasilkan Lulusan yang memiliki Kemampuan teknologi digital.
- iii. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mengembangkan keterampilan Digital melalui berbagai kegiatan dengan bermitra dengan Sektor Swasta serta mengintegrasikan dengan pemangku kepentingan secara inklusif.
- iv. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang mendukung kesiapan masyarakat memasuki era *new normal*.
- v. Komisi I DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk mempercepat berbagai upaya dalam membangun Literasi digital sehingga menjadi upaya perubahan *culture* dan *attitude* masyarakat dalam percepatan transformasi digital.

c) Aspek Anggaran

- i. Komisi I DPR RI perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain: percepatan infrastruktur TIK (Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di wilayah 3T, Fasilitas Percepatan Penggelaran Infrastruktur oleh Operator Telekomunikasi di wilayah non 3T, Digitalisasi Penyiaran, Dukungan Layanan Pos Logistik), pembangunan Pusat Data.
- ii. Menetapkan mekanisme pendanaan digital seluruh K/L/D/I.

d) Aspek Regulasi/Legislati

- i. Perlu percepatan penyelesaian RUU yang lebih komprehensif yang mengatur tentang Digitalisasi yang secara substantif menjamin kepastian perlindungan hak-hak digital atas privasi dan keamanan untuk pencegahan kejahatan siber dan kebocoran data pribadi.
- ii. Perlu ada harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan tentang komunikasi dan informatika agar transformasi teknologi digital ini bisa berjalan dengan baik.

e. Aspek Efektifitas Kinerja dan Program

- i. Perlu adanya mekanisme pelaporan secara berkala dari Dirjen Kemkominfo terkait tentang efektifitas kinerja dan program yang telah berlangsung dalam memonitor dan manajemen Covid-19. Utamanya pada efektifitas aplikasi upaya layanan prima (chatbot, kanal informasi seperti sms blast dengan sender BNPB, hingga

arahan Kemkominfo kepada para penyedia platform digital) sebagai upaya keberlanjutan dalam menghadapi *new normal*.

- ii. Perlu adanya laporan efektifitas kinerja atau program dengan pendekatan statistik oleh Kemkominfo, sehingga masyarakat tidak hanya menerima laporan berupa apa yang dikerjakan namun juga mampu melihat efektifitas kinerja atau program yang dilakukan.
- iii. Dirjen Aptika pernah menyarankan terkait perubahan model bisnis (*pivoting*) bagi *start up company* untuk bertahan dengan pandemi Covid-19. Maka Dirjen Aptika perlu juga menerangkan manajemen atau pola *pivoting* seperti apa yang telah diupayakan pemerintah kepada *start up* bahkan *corporate* dan kerja pemerintahan karena hal ini sangat diperlukan dalam era *new normal* oleh berbagai lini pekerjaan.

f. Aspek Kelembagaan Kemenkominfo: Peran Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- i. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo sebagai *leading sector* yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk memperbaiki dan mengevaluasi strategi komunikasi publik, agenda setting komunikasi publik sehingga terjadinya Orkestrasi komunikasi dan konten informasi yang harmonis, objektif dan tepat.
- ii. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo mengevaluasi efektifitas Penanganan Covid-19 yang dilakukan secara Kolaboratif dalam Konsep Pentahelix dengan memperbaiki dan meningkatkan koordinasi dan Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah, Komunitas/Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, serta Media sebagai upaya diseminasi informasi penanganan covid-19.
- iii. Komisi I DPR RI mendesak Lembaga Penyiaran, KPI, dan Dewan Pers menjalankan tupoksi masing-masing yang dapat membantu percepatan penanganan Covid-19.
- iv. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo sebagai bagian dari Keanggotaan Gugus Tugas dalam tugasnya pelaksana monitoring media pemberitaan, maka perlu menekankan kepada Institusi/Perusahaan Media baik media cetak, media elektronik, dan New Media untuk menjalankan Peran dan Fungsi media yang sebenarnya sehingga dapat membantu Pemerintah untuk memberikan latar belakang dan pemahaman terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, menyamakan persepsi antara Media dengan Pemerintah agar informasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan keresahan/ketidakpastian di tengah masyarakat serta

dapat menekankan tentang fokus kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 untuk yang dalam tugas percepatan disebarluaskan oleh media secara berimbang.

- v. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengevaluasi sejauhmana efektifitas berbagai Program dukungan penanganan covid yang dilakukan Kemenkominfo dalam percepatan penanganan Covid 19 antara lain: pedulilindungi, chatbot covid19.go.id, sosialisasi pedulilindungi dan chatbot covid19.go.id, perubahan jatuh tempo pembayaran PNBK & penundaan PM jasa telekomunikasi, penyediaan akses internet untuk RS darurat & pusat, karantina covid – 19, dll.

b. Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19

- 1) Panja telah menyampaikan Laporan kegiatannya pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 10 November 2020 dan Rapat Intern dapat menerima Laporan tersebut untuk selanjutnya menjadi rekomendasi Komisi I DPR RI kepada Mitra Kerja terkait.

- 2) Adapun rekomendasi Panja adalah sebagai berikut:

a) Pelindungan WNI di Luar Negeri

- i. Panja mendorong Kemlu untuk terus meningkatkan pelindungan WNI di LN dengan mengedepankan manajemen sentuhan kemanusiaan (*human touch management*) dan norma internasional, serta meminimalkan risiko mitigasi, berkerja sama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan secara aktif dengan lebih mendahulukan kelompok rentan, dan mengedukasi yang berkesinambungan kepada WNI di LN.
- ii. Komisi I DPR RI mendorong Kemlu untuk terus meningkatkan upaya diplomasi vaksin dalam setiap pertemuan Internasional untuk terus menyuarakan pentingnya akses terhadap vaksin yang aman, tepat waktu, serta dengan harga terjangkau bagi semua negara, melalui strategi paralel baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, dan strategi jangka panjang dengan pengembangan vaksin nasional (merah putih) oleh Konsorsium Vaksin Nasional.

b) Kinerja Perwakilan RI di Luar Negeri

Panja meminta Perwakilan RI di LN untuk tetap mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya yang sudah baik dalam penanganan dan pelindungan WNI di LN pada masa pandemi Covid-19, termasuk pula dalam menjalin hubungan, dukungan, dan kerja sama,

serta diplomasi di LN dalam mengatasi pandemi Covid-19. Untuk selanjutnya Panja mendorong kinerja Perwakilan RI di LN diarahkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c) Pelindungan WNI di Perbatasan

Panja mendorong koordinasi sinergis antara TNI dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pengetatan pengawasan titik perlintasan batas antarnegara, terutama:

- i. Daerah atau perairan yang menjadi sengketa;
- ii. Pos lintas batas baik untuk darat dan laut;
- iii. Poros jalan utama ke wilayah perbatasan;
- iv. Jalan tikus; dan
- v. Jalur penyelundupan baik yang dilaksanakan di darat dan/atau lewat laut demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

d) Anggaran

Panja meminta Kemlu, Mabes TNI AD dan AL untuk menyusun secara cermat kebutuhan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 guna mengantisipasi kemungkinan adanya pandemi Covid-19 gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya.

c. Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI

Panja telah menyampaikan Laporan kegiatannya pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 10 Desember 2020 dan Rapat Intern dapat menerima Laporan tersebut, Dalam Laporrannya Panja merekomendasikan agar pada Tahun 2021 Panja dapat dibentuk kembali mengingat:

- 1) Perlunya mengakselerasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Kinerja Kemhan dan TNI, Kenaikan Tunjangan Prajurit Yang Bertugas di Wilayah Terpencil, Tunjangan Oditur Militer, Tabungan Hari Tua, Tunjangan Khusus TNI Untuk Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, Wan TNI, Satuan Khusus TNI, dan kenaikan ULP Prajurit dan Uang Makan PNS.
 - 2) Perlunya membahas aspek lainnya dalam hal kesejahteraan prajurit TNI seperti aspek kesehatan, perumahan, pendidikan, dan sebagainya.
2. Rapat Intern Komisi I DPR RI dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Pimpinan DPR RI mengenai salinan Kepres RI Nomor 105/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 terkait dengan telah ditetapkan pemberhentian sebagai Anggota Dewas LPP TVRI atas nama Sdr Arief Hidayat Thamrin.

3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I DPR RI, Komisi III DPR RI dan Menkumham pada tanggal 25 November 2020 terkait dengan lanjutan pembicaraan Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada pertemuan konsultasi tanggal 30 September 2020.

4. **Kunker Spesifik Komisi I DPR RI**

Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi :

- a. Banten (Tangerang) tanggal 24-26 November 2020 dalam rangka mengetahui:
 - 1) Peran Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masyarakat dengan dukungan Alpalhan (Alat Peralatan Pertahanan) serta sarana dan prasarana yang ada;
 - 2) Hal-hal lain terkait dengan Kesejahteraan Prajurit (seperti perumahan, kesehatan, dan tunjangan), Alutsista, SDM, dan Kendala-kendala dalam pelaksanaan tupoksi.
- b. Jawa Barat (Bekasi) tanggal 24-26 November 2020 dalam rangka mengetahui:
 - 1) Peran Batalyon Infanteri Mekanis 202/Taji Malela dan Batalyon Artileri Medan 7/Biring Galih dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penerapan AKB di masyarakat dengan dukungan Alpalhan serta sarana dan prasarana yang ada.
 - 2) Hal-hal lain terkait dengan Kesejahteraan Prajurit (seperti perumahan, kesehatan, dan tunjangan), Alutsista, SDM, dan Kendala-kendala dalam pelaksanaan tupoksi.
- c. Jawa Tengah (Purwokerto) tanggal 1-3 Desember 2020 dalam rangka mengetahui kondisi kesejahteraan prajurit di lingkungan Korem 071/Wijayakusuma beserta sejumlah potensi masalah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan Prajurit di lingkungan Korem 071/Wijayakusuma.
- d. Jawa Tengah (Magelang) tanggal 1-3 Desember 2020 dalam rangka dalam rangka mengetahui:
 - 1) Peran Akmil dalam menyiapkan kader pemimpin TNI AD masa depan yang professional melalui program pendidikan dan latihan.
 - 2) Pemenuhan kesejahteraan taruna dan pendidik beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Akmil.

5. Kunker Luar Negeri Komisi I DPR RI

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan peningkatan hubungan kedua negara melalui Diplomasi Parlemen, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke:

1. Turki pada tanggal 23-28 November 2020
2. Amerika Serikat pada tanggal 15-20 Desember 2020

6. Kunker Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, yaitu pada tanggal 12-15 Desember 2020, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker ke Provinsi:

- a. Jawa Barat (Bandung)
- b. Jawa Timur (Malang)

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

Jakarta, 11 Desember 2020
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001